

## ABSTRAK

Masa sekarang ini banyak perkara pidana yang juga memiliki unsur perdata dan dapat dimintakan pertanggung jawaban seperti perdata yaitu ganti rugi . Pasal 98 sampai 101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutnya sebagai Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian atas tindak pidana. . Tetapi dalam praktiknya sistem penggabungan perkara ini masih ditemui kekurangan atau kendala, baik dari sistem mekanisme pelaksanaannya maupun peraturan yang mengatur, serta kesadaran masyarakat khususnya para korban tindak pidana yang tidak mengetahui adanya sistem penggabungan perkara ini. Korban tindak pidana penggelapan dan korban lalu lintas adalah salah satu objek yang dapat dilakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, karena dinilai korban menderita kerugian atas tindakan pelaku . Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan yuridis empiris dengan sumber data Hukum Islam, data primer dan data sekunder . Yang diambil dengan alat pengumpul data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier . Tujuannya untuk mengetahui pengaturan tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian atas tindak pidana, untuk mengetahui mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian atas tindak pidana . Dan untuk mengetahui kendala dan solusi pada penggabungan gugatan ganti kerugian atas tindak pidana . Berdasarkan hasil penelitian ini dipahami bahwa pengaturan mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian atas tindak pidana penggelapan tertera di Pasal 98 sampai 101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan pengaturan tersebut masih kurang jelas, selanjutnya mengenai mekanisme pelaksanaannya juga masih kurang karena memang belum ada semacam peraturan pelaksanaan .

**Kata kunci :** Penggabungan Perkara, Gugatan Ganti Kerugian, Tindak Pidana

## **ABSTRACT**

*Today there are many criminal criminal cases that also have a civil element and cant be held accountable as civil, namely compensation . Articles 98 to 101 of the Criminal procedure code refer to it as merger of cases of compensation claims for criminal acts . But in practice this system of merging cases is still encountered shortcomings or constraints, both form the system of merging cases is still encountered shortcoming or constraints, both from the system of implementation mechanism an regulations governing, and public awareness, especially victims of criminal acts who are not aware of the system of merging these cases . Criminal victims of embezzlement and victims of traffic are one of the objects that can be carried out by merging compensation claims, because they are considered to have suffred loses for the actions of the perpetaros . The research conducted is empirical legal research with an empirical juridical approach with Islamic Law data sources, Primary data an secondary data. Which is taken bay means of primary data collection by conducting interview and secondary data by processing data from primary, secondary and tertiary legal materials. The aim is to find out the regulation regarding the merger of compensation claims for criminal acts of embezzlement and to find out the obstacles and attempts to merge claims for compensations for embezzlement . Based on the results of this study it is understood that regulation regarding the merger of compensations claim for criminal acts of embezzlement is stated in articles 98 to 101 of the criminal procedure code and the regulations is still unclear then the implemention is still lacking because there is no sort of implementing regulations. There are still many obstacles that must be addressed from this system to realize the intent and purpose of the merger of compensation claims for criminal acts.*

**Keyword:** *Merging of Cases, Claims for Compensation, Crime of emblem*